



T E S I S

UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MENURUT PERSEPSI HUKUM KENOTARIATAN

Disusun oleh:
EKA APRILIA
NIM. 217231033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MENURUT
PERSEPSI HUKUM KENOTARIATAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:
EKA APRILIA
NIM. 217231033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : EKA APRILIA
NIM : 217231033
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MENURUT
PERSEPSI HUKUM KENOTARIATAN
Title : LEGAL EFFORT OF NOTARIES AGAINST DECISIONS
OF THE REGIONAL GUARDIAN COUNCIL ACCORDING
TO THE PERCEPTION OF NOTARIAL LAW

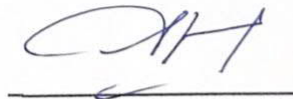
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. MAMAN SUDIRMAN, Dr., S.H. M.H., M.Kn.

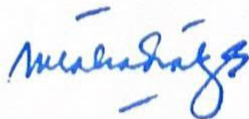
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum., Dr.

Persetujuan

Nama : EKA APRILIA
NIM : 217231033
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MENURUT
PERSEPSI HUKUM KENOTARIATAN

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

- (A) Nama : Eka Aprilia (217231033)
- (B) Judul Tesis : Upaya Hukum Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan
- (C) Halaman : xi + 151 + 2024.
- (D) Kata Kunci : Upaya Hukum, Notaris, Putusan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Hukum Kenotariatan.
- (E) Isi Abstrak

Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang diakui oleh hukum. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, notaris tidak luput dari pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab MPWN Propinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap putusan MPWN yang telah dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut persepsi Hukum Kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, yang bersumber dari data sekunder. Pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitiannya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPWN Propinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam UUJN. Sebagai lembaga pengawas, MPWN bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi ini, MPWN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin, termasuk teguran tertulis, kepada notaris yang dinilai melakukan pelanggaran. Dalam konteks Hukum Kenotariatan, putusan MPWN yang telah dinyatakan salah oleh PTUN memberikan peluang bagi notaris yang dirugikan untuk melakukan berbagai upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Notaris sebagai pejabat publik yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki kedudukan yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, dalam menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan hukum, notaris dapat menggunakan berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Secara keseluruhan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris meliputi pengajuan keberatan kepada MPD atau MPP, pengajuan gugatan ke PTUN, hingga tuntutan perdata untuk pemulihan nama baik dan kerugian. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak notaris, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi notaris dan memperkuat sistem hukum yang mendukung keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan revisi atau penegasan dalam peraturan terkait, seperti UUJN untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban notaris dalam mengajukan upaya hukum terhadap keputusan MPW.

- (F) Acuan : 65 (1979 - 2022)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Eka Aprilia

ABSTRACT

(A) Name: Eka Aprilia (217231033)

(B) Thesis Title:

(C) Pages: $x + 151 + 2024$.

(D) Keywords: Legal Remedies, Notary, Decision, Notary Regional Supervisory Board, Notary Law

(E) Contents of the Abstract

Notaries have a strategic role in supporting legal certainty through the creation of authentic deeds recognized by law. However, in carrying out their duties and functions, notaries are not free from supervision by the Regional Supervisory Council (MPW) which aims to maintain integrity and professionalism. The problem faced is how the responsibility of the MPWN of DKI Jakarta Province which has given a written warning sanction to a notary that is contrary to applicable laws and regulations and what legal efforts can be taken by a notary against the decision of the MPWN which has been declared wrong by the State Administrative Court (PTUN) according to the perception of Notary Law. The research method used in this paper is normative legal research. The research specification is descriptive, which is sourced from secondary data. Data collection is through literature study. The approach used is the statutory and conceptual approach. The research is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the MPWN of DKI Jakarta Province has responsibilities that are expressly regulated in the UUJN. As a supervisory institution, the MPWN is tasked with ensuring that the implementation of the duties and authorities of notaries is in accordance with the principles of legality, justice, and compliance with applicable laws and regulations. In carrying out this function, the MPWN has the authority to provide disciplinary sanctions, including written warnings, to notaries who are deemed to have committed violations. In the context of Notary Law, the MPWN decision that has been declared wrong by the PTUN provides an opportunity for notaries who are harmed to take various legal measures to protect their rights. Notaries as public officials who work based on public trust have a position that is regulated and protected by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). Therefore, in dealing with decisions that are not in accordance with the law, notaries can use various available legal mechanisms. Overall, legal efforts that can be taken by a notary include filing an objection to the MPD or MPP, filing a lawsuit with the PTUN, to a civil lawsuit for the restoration of good name and damages. These steps are not only aimed at protecting the rights of notaries, but also at maintaining the integrity of the notary profession and strengthening the legal system that supports justice and legal certainty. Revision or clarification is needed in related regulations, such as UUJN to provide clarity regarding the rights and obligations of notaries in filing legal action against MPW decisions.

(F) References : 54 (1986-2024)

(G) Supervisor: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Author: Eka Aprilia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul: **“Upaya Hukum Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini akan sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan sekaligus Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Kepala Prodi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. I Wayan Gde Wiryawan., S.H.,M.H., selaku dosen penguji ujian seminar proposal.
5. Prof. Mella Ismelina F. R. S.H.,M.Hum., selaku dosen penguji ujian sidang tesis.
6. Dr. Maman Sudirman., S.H., Sp.1.,M.H.,M.Kn.,M.E., selaku dosen penguji ujian sidang tesis.

7. Kepada Ricky Vandre Teguh Jaya yang senantiasa menemani penulis dalam berkehidupan, yang membantu penulis dengan segenap jiwa dan raga, memberikan dukungan moral, motivasi, doa dan hal lainnya untuk penulis dapat mengerjakan tesis.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.
10. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 15 Januari 2025

(Eka Aprilia)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Pernyataan Keaslian Tulisan (Orisinalitas)	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Lampiran	xi
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
Bab II. Tinjauan Pustaka	19
A. Teori Kewenangan.....	19
B. Teori Keadilan.....	31
C. Teori Perlindungan Hukum.....	39
Bab III. Data Hasil Penelitian.....	52
A. Kasus Posisi.....	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.Jkt	52
C. Amar Putusan PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.Jkt.....	78
Bab IV. Analisis Permasalahan	79
A. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta yang Telah Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	79

	B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang Telah Dinyatakan Salah oleh PTUN Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan	112
Bab	V. Penutup.....	148
	A. Kesimpulan.....	148
	B. Saran.....	150

Daftar Pustaka

Pernyataan

Nama : EKA APRILIA
NIM : 217231033
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MENURUT
PERSEPSI HUKUM KENOTARIATAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



EKA APRILIA
NIM. 217231033

DAFTAR SINGKATAN

BAPEK	adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian.
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KIP	adalah Komisi Informasi Publik
KK	adalah Kartu Keluarga
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPN	adalah Majelis Pengawas Notaris
MPP	adalah Majelis Pengawas Pusat
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
MPWN	adalah Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PKPU	adalah penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Keputusan Dekan Pembimbing Tesis
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran 5	Hasil Turnitin Tesis
Lampiran 6	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	Letter of Acceptance (LOA) Sinta 3
Lampiran 9	Putusan Pengadilan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT